

IMPLEMENTASI PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU-KUMKM BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN KENDAL

Dinda Febria Istifira, Amni Zarkasyi Rahman, Maesaroh

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The dominance of micro-enterprises with limited resources, low levels of formality and business legality, restricted access to digital technology, and challenges in obtaining formal financing are among the key issues faced by MSMEs in Kendal Regency. To address these challenges and promote the advancement of MSMEs, the Kendal Regency Government has implemented the Integrated Business Service Center (PLUT) program based on Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No. 9 of 2013. This study aims to analyze the implementation of the PLUT-KUMKM program for micro-enterprises in Kendal Regency and identify the supporting and inhibiting factors in its execution. A qualitative approach was employed using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn as the analytical framework. Data were collected through interviews with informants from the Department of Trade, Cooperatives, and MSMEs as well as micro-entrepreneurs, using purposive and snowball sampling techniques. The findings indicate that the implementation of PLUT-KUMKM has been fairly effective, particularly in facilitating business legality, providing training, and offering technical assistance. However, some performance indicators have declined, and the program still faces challenges related to human resources, socio-economic-political conditions, communication, and the low awareness of entrepreneurs regarding legality and digital transformation. The study recommends optimizing existing resources and applying a community-based approach to enhance active participation of micro-entrepreneurs, especially in the digital transformation process.

Keywords: MSMEs, PLUT-KUMKM, policy implementation, micro-enterprises

ABSTRAK

Dominasi usaha mikro dengan keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat formalitas dan legalitas usaha, akses terbatas terhadap teknologi digital, serta kesulitan memperoleh pembiayaan formal merupakan tantangan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kendal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong UMKM agar naik kelas, Pemerintah Kabupaten Kendal mengimplementasikan program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PLUT-KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai landasan analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM serta pelaku usaha mikro, menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PLUT-KUMKM telah berjalan cukup baik, khususnya dalam aspek fasilitasi legalitas, pelatihan, dan pendampingan teknis. Namun, beberapa indikator kinerja mengalami penurunan dan pelaksanaan program masih menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia, lingkungan sosial-ekonomi-politik, komunikasi, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan digitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi sumber daya yang tersedia dan penerapan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi aktif pelaku usaha mikro, khususnya dalam proses transformasi digital.

Kata Kunci: UMKM, PLUT-KUMKM, implementasi kebijakan, usaha mikro

PENDAHULUAN

Persaingan global menuntut negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjadikan perekonomian nasional menjadi stabil serta terus meningkat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat serta agar dapat menekan tingkat pengangguran. Salah satu sektor strategis yang diandalkan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut peraturan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah UMKM merupakan usaha atau aktivitas produktif yang dapat dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sesuai kriteria dalam peraturan perundang-undangan. UMKM memiliki berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja, dengan andil sebesar 61,1% terhadap PDB pada tahun 2018 dan melibatkan 117 juta tenaga kerja (Nainggolan, 2020).

Pada tahun 2024, jumlah UMKM tertinggi secara nasional tercatat di Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur (UKMIndonesia.id, 2023).

Namun, tingginya jumlah UMKM tidak serta merta mencerminkan peningkatan kualitas, karena masih banyak pelaku UMKM, terutama usaha mikro, yang belum mampu naik kelas akibat keterbatasan dalam pemasaran informasi, pembiayaan, perizinan, dan literasi digitalisasi.

Jumlah UMKM di Kabupaten Kendal per-2024

No.	Kategori	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	17.945	18.312	18.582
2.	Usaha Kecil	290	307	321
	Total	18.235	18.619	18.903

*Sumber : Satudata.dinkop-
umkm.jatengprov.go.id*

Di Kabupaten Kendal, jumlah UMKM pada tahun 2024 mencapai 18.903 unit, dengan dominasi usaha mikro sebesar 18.582 unit (98,3%) (Satudata.dinkop-umkm.jatengprov). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih berada pada tahap awal pengembangan. Tagline “UMKM Naik Kelas” (Kendalkab.go.id,) menjadi strategi pemerintah untuk mendorong transformasi kapasitas usaha mikro menjadi lebih berdaya saing.

Berdasarkan data Satudata Dinkop-UMKM Provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM di Kendal meningkat dari 18.235 unit pada 2022 menjadi 18.903 unit pada 2024. Namun, dari studi pendahuluan di

Dinas Koperasi dan UMKM Kendal serta PKUT-KUMKM, diketahui bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas usaha dan masih menghadapi kendala akses terhadap pelatihan digital, permodalan, dan perbankan. Sebanyak 40% pelaku usaha belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), atau sertifikasi halal. Data PLUT Kendal menunjukkan penurunan jumlah UMKM terlayani dari 2.752 pada 2022 menjadi 793 pada 2024, yang menandakan perlunya perluasan jangkauan layanan PLUT (satu data Dinkop-UMKM Jateng, 2025).

Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) merupakan inisiatif strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan. PLUT hadir sebagai layanan non-finansial berupa pendampingan, konsultasi, pelatihan manajerial dan teknis bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Berdasarkan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2013, PLUT menjadi pusat pelayanan komprehensif dengan tenaga pendamping profesional yang berfokus pada lima bidang: produksi, pembiayaan, SDM, kelembagaan, dan pemasaran.

PLUT telah tersebar di 84 lokasi di 32 provinsi, termasuk 11 lokasi di Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Kendal (Nasional, 2020). Sejak beroperasi pada 2019 di bawah Dinas Perdagangan,

Koperasi, dan UKM, PLUT Kendal melayani lima bidang tersebut melalui konsultan yang ditempatkan di lima kawedanan. Layanan PLUT meliputi konsultasi usaha, fasilitasi perizinan, HAKI, pelatihan digitalisasi, hingga pendampingan lapangan.

Kabupaten Kendal sendiri memiliki keunggulan geografis dan demografis, termasuk wilayah pantai dan pegunungan, potensi SDA yang melimpah, serta dominasi penduduk usia produktif. Dengan Kawasan industri besar di Jawa Tengah dan letaknya di jalur lintas Pantura. Kendal memiliki peluang besar dalam pengembangan UMKM lokal.

Hasil Capaian Kinerja PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal

Kategori	2022	2023	2024
NIB	1.150	839	604
PIRT	148	-	39
Halal	72	-	91
Hak Merek	35	-	24
Pembiayaan	243	64	11
Pemasaran	1.030	147	-
Pelatihan	-	-	8
Sosialisasi	-	-	3
Lainnya (Event Bazar, Pendampingan Usahaaha, Konsultasi BPOM)	25	111	13

Kategori	2022	2023	2024
UMKM Terlayani	2.752	1.136	793

Sumber: Laporan Evaluasi PLUT Kendal

Data capaian kinerja pada laporan evaluasi PLUT Kabupaten Kendal menunjukkan dinamika pelayanan selama 2022-2024. Tahun 2022 mencatat layanan tertinggi, namun terjadi penurunan pada 2023 dan 2024. Meskipun jumlah layanan menurun, terdapat pergeseran fokus ke kualitas layanan seperti legalitas dan pelatihan. Misalnya, penerbitan NIB menurun dari 1.150 (2022) menjadi 91 (2024). Akses pembiayaan masih menjadi tantangan, dengan hanya 11 UMKM yang terlayani pada 2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Kusumawati (2024), Dewi (2019), dan Purnanto (2014), implementasi PLUT di daerah lain mengalami hambatan dalam sosialisasi, sumber daya, dan komunikasi. Menurut teori implementasi Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007), faktor-faktor seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, dan disposisi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Melihat pentingnya PLUT dalam pemberdayaan UMKM termasuk usaha mikro serta adanya tantangan-tantangan

struktural dan teknis dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana implementasi PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal telah berjalan optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Situs penelitian yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM Kabupaten Kendal dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal. Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, di antaranya yaitu: 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Kendal; 2) Konsultan PLUT Bidang Pembiayaan; 3) Konsultan PLUT Bidang SDM; 4) Pelaku usaha mikro Kendal yang telah dibantu oleh PLUT; 5) Pelaku usaha mikro Kendal yang belum pernah dibantu oleh PLUT. Teknik analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Kemudian untuk kualitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kendal

Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM di Kabupaten Kendal bertugas untuk membantu UMKM dalam mengatasi berbagai kendala usaha mulai dari aspek legalitas, pembiayaan, pemasaran, hingga peningkatan kapasitas melalui pelayanan. Tujuan utama program ini adalah mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM terutama usaha mikro agar dapat naik kelas secara bertahap melalui berbagai layanan strategis, seperti legalitas, pembiayaan, pemasaran, pelatihan serta konsultasi teknis lainnya. Hal ini sejalan dengan mandat dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.09/Per/M.KUKM/I/2013 yang mengatur bahwa PLUT wajib menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pada lima bidang utama: legalitas, pembiayaan, pemasaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Model pelaksanaan PLUT Kendal bersifat proaktif, dengan pendekatan *jemput bola* ke lokasi pelaku usaha, terutama yang berada di wilayah pedesaan. Harapannya, para pelaku UMKM dapat memperoleh peningkatan kapasitas usaha, legalitas, hingga akses pasar dan

pembiayaan. Dengan adanya pendampingan yang komprehensif dari PLUT, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan pasar, tetapi juga dapat berkembang menjadi usaha kecil yang mandiri, memiliki legalitas usaha, akses pembiayaan, serta daya saing di era digital.

a.) Layanan Legalitas

Salah satu fokus utama PLUT Kendal adalah membantu UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, dan hak merek. Data capaian menunjukkan bahwa jumlah NIB yang diterbitkan mengalami penurunan dari 1.150 pada tahun 2022 menjadi 604 pada tahun 2024. Penurunan serupa juga terlihat pada pengurusan PIRT dan hak merek. Namun, capaian untuk sertifikasi halal justru meningkat dari 72 pada 2022 menjadi 91 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan permintaan pelaku usaha terhadap produk halal, yang menjadi salah satu nilai tambah di pasar.

b.) Layanan Pembiayaan

Layanan pembiayaan yang disediakan oleh PLUT Kendal bertujuan untuk membantu UMKM

memperoleh akses modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Salah satu aspek penting yang turut difasilitasi oleh PLUT adalah pembinaan pembukuan usaha. PLUT memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pencatatan keuangan yang baik dan benar agar UMKM dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan terpercaya. PLUT juga memberikan edukasi mengenai berbagai skema pembiayaan yang tersedia, termasuk pinjaman tanpa agunan, kredit usaha rakyat (KUR), serta bantuan dana hibah jika memungkinkan. Selain itu, PLUT memfasilitasi pertemuan antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan dan membantu proses verifikasi administrasi agar pengajuan pembiayaan dapat berjalan lancar. Program pembiayaan yang difasilitasi oleh PLUT Kendal juga mengalami penurunan signifikan, dari 243 UMKM yang mendapatkan pembiayaan pada tahun 2022 menjadi hanya 11 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya keterbatasan sumber daya atau perubahan kebijakan dalam pendampingan pembiayaan UMKM. Faktor ini perlu menjadi perhatian

karena akses pembiayaan merupakan aspek vital dalam pengembangan usaha.

c.) Layanan Pemasaran

Pelayanan pemasaran yang dilakukan PLUT, seperti fasilitasi *event* bazar dan kemitraan pemasaran, juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dengan capaian 1.030 pada 2022 dan menurun drastis menjadi 147 pada 2023, serta tidak tercatat pada 2024. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM melalui program PLUT. Layanan pemasaran yang diberikan oleh PLUT Kendal bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi UMKM melalui berbagai kegiatan promosi dan fasilitasi pemasaran. Pelaksanaan layanan ini mencakup penyelenggaraan *event* seperti bazar, pameran produk UMKM, pendampingan dalam pengembangan branding, serta bantuan dalam menjalin kemitraan dengan pelaku pasar dan distributor.

d.) Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan dan sosialisasi merupakan bagian penting dari pengembangan kapasitas UMKM yang mulai dijalankan oleh PLUT Kendal pada

tahun 2024 dengan capaian masing-masing sebanyak 8 pelatihan dan 3 kegiatan sosialisasi. Angka yang masih terbatas ini menunjukkan bahwa program pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi baru mulai diinisiasi dan masih perlu ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih luas. Layanan pelatihan dan sosialisasi merupakan bagian penting dari upaya PLUT Kendal dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan UMKM. Pelatihan diberikan untuk membekali pelaku usaha dengan keterampilan teknis, manajerial, serta pemahaman tentang standar produksi dan pemasaran. Sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan informasi terkait regulasi, program bantuan, dan peluang usaha yang tersedia bagi UMKM.

e.) Pendampingan dan Layanan Lainnya

Layanan pendampingan usaha, *event* bazar, dan konsultasi teknis lainnya menunjukkan fluktuasi capaian dengan jumlah 25 pada 2022, meningkat menjadi 111 pada 2023, dan turun kembali menjadi 13 pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pelaksanaan program yang dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Layanan pendampingan yang diberikan oleh PLUT Kendal bertujuan untuk memberikan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai persoalan usaha yang dihadapi, baik dari aspek teknis produksi, pengelolaan bisnis, hingga perizinan dan pemasaran. Pendampingan ini dilakukan secara personal maupun kelompok melalui konsultasi rutin, *monitoring*, dan evaluasi perkembangan usaha. Selain itu, PLUT juga menyelenggarakan layanan lainnya seperti *event* bazar, konsultasi terkait BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta berbagai kegiatan pendukung lain yang bertujuan meningkatkan eksposur produk UMKM dan memperkuat jaringan usaha. *Event* bazar yang rutin diselenggarakan menjadi sarana bagi UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk secara langsung kepada konsumen, sekaligus memperluas jaringan pemasaran.

2. Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kendal Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn

Pada penelitian ini, digunakan enam variabel yang memengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menurut Subarsono, (2017), di antaranya yaitu:

a.) Standar dan Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan ini telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kendal yaitu untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas. Meski demikian, tidak terdapat peraturan daerah (Perda) khusus mengenai PLUT-KUMKM, sehingga standar pelaksanaan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Dasar implementasi PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal masih berpedoman pada Peraturan Menteri UKM Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013.

Peneliti mendapatkan data bahwa seluruh aspek target tercapai di atas 100% kecuali pada pembiayaan yang hanya tercapai sebesar 64% karena sudah ditangani oleh pihak ketiga. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, sasaran program PLUT Kendal adalah pelaku UMKM di Kabupaten Kendal, yang pada 2023 tercatat sebanyak 25.325 pelaku.

Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Tacjhan,

2006) bahwa standar yang tidak terdefinisi secara eksplisit dapat menghambat konsistensi implementasi. Perbandingan dengan daerah lain, seperti Sleman dan Gianyar, menunjukkan bahwa keberadaan Perda PLUT memperkuat efektivitas implementasi di tingkat lokal.

b.) Sumber Daya

PLUT-KUMKM Kendal memiliki 5 konsultan dengan pembagian wilayah kerja masing-masing mencakup 4-5 kecamatan serta 1 admin yang merangkap sebagai konsultan IT. Setiap konsultan telah tersertifikasi sesuai dengan bidangnya. Namun, struktur ini masih tergolong terbatas mengingat cakupan wilayah dan keragaman kebutuhan usaha mikro.

Dari sisi anggaran, alokasi dana APBD mengalami penurunan dari Rp.2,8 miliar (2022) menjadi Rp. 2,5 miliar (2023), menunjukkan keterbatasan pada pembiayaan dalam mendukung ekspansi layanan. Hal ini sejalan dengan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa minimnya sumber daya akan berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

c.) Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur pelaksana terdiri dari lima konsultan utama yang membawahi lima wilayah kawedanan. Masing-masing

konsultan bertanggung jawab pada satu bidang layanan. Model pelaksanaannya bersifat proaktif dengan pendekatan jemput bola ke lokasi pelaku usaha, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha mikro memperoleh legalitas, akses pasar, dan pendampingan usaha yang mana menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan.

Ketidakhadiran SOP dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan teknis dan memperbesar kesenjangan pelayanan.

d.) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi antar bidang di internal PLUT Kendal berjalan melalui pembagian wilatan dan bidang. Komunikasi eksternal dilakukan melalui grup *WhatsApp* dan media sosial lainnya seperti *Instagram* dan *Facebook*. Meskipun efektif bagi sebagian pelaku usaha, namun tidak menjangkau seluruh UMKM, terutama yang belum tergabung dalam jaringan komunitas.

Dukungan dari dinas lain seperti DPMPSTSP, Dinkes, dan Kementerian Agama cukup kuat, namun belum semua pelaku usaha memahami mekanisme lintas dinas di ini. Van Meter dan Van Horn

menekankan bahwa komunikasi yang tidak segaram dapat menghambat pemahaman dan pelaksanaan kebijakan secara merata.

e.) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Letak geografis Gedung PLUT di Kecamatan Gemuh cukup jauh dari pusat kota, menjadi hambatan akses fisik bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi. Dari sisi sosial, literasi digital dan kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Namun, dukungan politik ditunjukkan melalui alokasi dana APBD dan kerjasama dengan karakteristik sosial setempat seperti adanya kerja sama dengan ritel modern seperti Alfamart dan Hotel Sae Inn agar lebih tepat guna dan efektif. Namun,, tantangan tetap muncul dari sisi lingkungan dan keterbatasan fasilitas.

f.) Disposisi Pelaksana

Para pelaksana (konsultan) menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi terhadap implementasi program. Hal ini tercermin diri capaian layanan, pelayanan, pelatihan, serta pendekatan aktif ke pelaku usaha. Namun, capaian rendah pada akses

pembiayaan (64%) menunjukkan bahwa sikap positif saja tidak cukup tanpa dukungan sistem birokrasi dan sumber daya yang memadai. Selain itu, adanya keluhan tentang pelatihan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang tidak ditindaklanjuti menunjukkan adanya celah pada aspek responsivitas.

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa sikap dan komitmen pelaksana merupakan fondasi keberhasilan suatu implementasi. Komitmen ini perlu didukung sistem yang responsif dan transparan.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kendal

a.) Sumberdaya

Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), bahwa merujuk pada jumlah SDM pada provinsi, seharusnya ada tambahan konsultan IT karena pelatihan sekarang sudah mengarah ke sosial media (*Tik Tok* dan *Shopee*). Namun dikarenakan ada 5 konsultan dan 1 admin di PLUT-KUMKM Kendal yang ternyata menguasai IT, sementara

admin tersebut merangkap sebagai konsultan IT pada PLUT-KUMKM.

b.) Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, Lingkungan

Gedung PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal terletak di ujung kecamatan terbarat di Kabupaten Kendal yang letaknya jauh dari Pusat Kota. Sedangkan untuk gedung PLUT kabupaten lain biasanya terletak di pusat kota sehingga memudahkan pelaku usaha dan konsumen mengetahui tentang adanya program PLUT-KUMKM. PLUT-KUMKM telah memanfaatkan kondisi politik dengan mendukung adanya kerjasama dengan ritel atau perusahaan swasta yaitu Alfamart, Hotel Sae Inn, untuk perkembangan distribusi produk UMKM. Salah satu tantangan signifikan dalam pengembangan UMKM adalah keberlanjutan pemasaran produk, khususnya ketika memasuki jaringan ritel modern.

c.) Sertifikat Haki

Kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dalam temuan lapangan. Salah satu pelaku usaha mengaku belum memiliki

HAKI dan bahkan tidak mengetahui kegunaannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh pelaku usaha lainnya yang menyatakan pernah menanyakan pelatihan HAKI kepada pendamping PLUT di kecamatan, namun justru mendapat tanggapan bahwa HAKI tidak terlalu penting apabila pemasaran masih terbatas di wilayah Kendal. Meskipun sempat dijanjikan akan dipanggil saat ada pelatihan terkait HAKI, yang bersangkutan mengaku tidak pernah mendapatkan undangan.

d.) Kesadaran Pelaku Usaha

Beberapa informan wirausaha memiliki usia di atas 40 tahun yang memang seringkali tidak *melek digital*, sehingga sulit untuk mengimplementasikan pelatihan digital marketing, walaupun rajin mengikuti. Selain digitalisasi pada pemasaran, digitalisasi pembukuan sudah mulai disadari oleh banyak pelaku UMKM di Indonesia, hanya saja, di Kabupaten Kendal, digitalisasi ini masih berat dijalankan oleh pelaku usaha walaupun sudah mengikuti pelatihan berulang kali. Permasalahan terletak di implementasi atau penerapan di usaha UMKMnya. Selain itu, salah

satu tantangan utama dalam pemberdayaan pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan dan pegunungan, adalah persoalan *mindset* atau pola pikir pelaku usaha itu sendiri. Seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pelaku usaha seringkali sulit mengubah kebiasaan lama dan menunjukkan resistensi terhadap inovasi atau pendekatan baru, terutama mereka yang berada di desa-desa dengan akses informasi terbatas. Di sisi lain, para pengusaha mikro juga kerap menunjukkan sikap mudah menyerah ketika menghadapi hambatan usaha, seperti kesulitan perizinan, pemasaran, atau penurunan penjualan.

KESIMPULAN

Implementasi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal dapat disimpulkan bahwa PLUT-KUMKM di bawah tanggung jawab Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal telah diupayakan secara maksimal. Kabupaten Kendal menjalankan program ini sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan UMKM sejak 2019, dengan lima fokus layanan utama: produksi, pembiayaan,

pemasaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Program ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaku usaha mikro melalui fasilitas legalitas usaha, pelatihan dan pendampingan teknis. Meskipun demikian, terdapat penurunan pada beberapa indikator, capaian kinerja selama periode 2022-2024. Penurunan terjadi pada layanan penerbitan NIB dan fasilitas pembiayaan, sementara layanan sertifikasi halal mengalami peningkatan. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi yang baru dimulai tahun 2024 juga menunjukkan potensi pengembangan ke depan.

Analisis implementasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa secara umum kebijakan ini telah dilaksanakan dengan cukup efektif.

Program PLUT-KUMKM Kendal sendiri telah melaksanakan 116 kegiatan selama empat tahun terakhir. Namun belum terdapat produk hukum daerah secara spesifik untuk mengatur pedoman pelaksanaan PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal. PLUT Kendal memiliki struktur sumber daya manusia yang cukup baik dan dibiayai oleh APBD. Namun, keterbatasan jumlah konsultan dan spesialisasi teknis seperti IT masih menjadi kendala. Agen pelaksana telah menunjukkan pelayanan

yang baik dan mampu menjadi katalis penyebaran informasi layanan PLUT secara informal melalui rekomendasi pelaku usaha. Komunikasi antar lembaga dan dengan masyarakat telah berjalan baik, namun belum optimal dalam penyebaran informasi kepada pelaku UMKM secara luas. Gedung PLUT yang jauh dari pusat kota serta fasilitas yang belum memadai hambatan tersendiri dalam pelaksanaan PLUT. Sikap dan pemahaman konsultan PLUT telah menunjang keberhasilan implementasi, terbukti dengan pencapaian beberapa indikator program.

Secara keseluruhan, kebijakan PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal telah memberikan dampak pada usaha mikro, walaupun masih diperlukan sejumlah penguatan dalam aspek sumber daya, infrastruktur, serta pendekatan berbasis komunitas dan legalisasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dari peneliti yang dapat diberikan untuk penguatan terhadap kendala pada implementasi PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut:

1. **Pendekatan berbasis komunitas dan pemetaan wilayah**, perlu ditingkatkan untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang belum

- terdaftar. Kolaborasi dengan BUMDes, pemerintah desa, dan forum UMKM lokal dapat memperluas cakupan layanan.
2. **Strategi komunikasi**, perlu lebih terstruktur dan aktif. Sosialisasi melalui perangkat desa hingga RT/RW serta penggunaan media sosial secara professional dapat menjangkau lebih luas, terutama pelaku usaha muda.
 3. **Revitalisasi fasilitas fisik dan digital Gedung PLUT** sangat penting. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan unit pendampingan keliling serta penguatan jaringan internet dan fasilitas pelatihan.
 4. **Peningkatan edukasi legalitas, HAKI dan digitalisasi**, perlu dikemas dalam pelatihan aplikasi berbasis simulasi, yang disesuaikan dengan segmentasi usia pelaku usaha. Edukasi mengenai HAKI sebaiknya dilakukan secara sistematis dan regular, melibatkan pendekatan komunitas dan evaluasi partisipasi.
 5. **Koordinasi lintas sektor**, harus diperkuat untuk mencegah tumpang tindih program dan memperkuat integrasi layanan antar dinas serta membuka kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pembiayaan.

6. **Strategi word of mouth** dimaksimalkan dengan melalui pembentukan duta UMKM atau relawan informasi, terutama untuk menjangkau wilayah pinggiran yang belum terlayani optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, T. ana. (2019). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung)*.
- Kendalkab.go.id. (n.d.). *UMKM Kendal Naik Kelas*.
https://kendalkab.go.id/berita/id/20231012006/disdakop_ukm_kendal_launching_umkm_center
- Kusumawati, D. (2024). *Analisis Peran Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT KUMKM) Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Banyumas*.
- Laporan Evaluasi PLUT Kabupaten Kendal.
- Nainggolan, E. U. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Retrieved.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit->

- Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html
- Nasional, C. (2020). *Daftar Lokasi PLUT-KUMKM*. <https://cisanasional.id/lokasi/>
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.09/Per/M.KUKM/I/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementrian Koperas.
- Purnanto. (2014). *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang*.
- Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kendal.
- Satudata.dinkop-umkm.jatengprov. (n.d.). *Jumlah UMKM Kabupaten Kendal*. <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/>
- Subarsono, A. (2017). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Tacjhan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- UKMIndonesia.id. (2023). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.